

ABSTRAK

KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR, 2016—2019

Oleh

M. GHAZY RAMADHAN JAUHARI

Jepang setelah perang dunia II menjadi negara yang memiliki keunikan terhadap status penggunaan kekuatan militernya sebagai negara yang dibatasi dengan *United States* berperan menjamin keamanan Jepang namun, dengan meningkatnya konflik sengketa teritorial antara Tiongkok dan Jepang menghadirkan militer Tiongkok di wilayah perbatasan Jepang pada Laut Tiongkok Timur menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan pertahanan baik negara maupun masyarakat Jepang sehingga mendorong adanya upaya reinterpretasi kembali Jepang atas artikel 9 yang memperluas fungsi *Japan Self Defense Force* sehingga mendorong pengembangan kapabilitas militer Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dengan *Offense Defense Theory* serta konsep *Maritime Strategy* untuk melihat kebijakan pertahanan Jepang atas kehadiran militer Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Timur dengan indikator yaitu kapabilitas militer, wilayah geografis, kondisi sosial dan politik, dan opini masyarakat dan pejabat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur mengedepankan upaya pencegahan. Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan semata-mata bukan untuk tujuan agresif tetapi untuk mencapai superioritas laut sehingga mampu mempertahankan negaranya sendiri menjadi negara yang normal (*Futsū no Kuni*).

Kata kunci: Jepang, Tiongkok, artikel 9, kapabilitas militer, Laut Tiongkok Timur

ABSTRACT

JAPANESE DEFENSE POLICY TOWARDS INCREASING CHINESE MILITARY PRESENCE IN THE EAST CHINA SEA, 2016—2019

By

M. GHAZY RAMADHAN JAUHARI

After World War II, Japan became a country that was unique in terms of the status of using its military force as a restricted country and the United States have a role to guaranteeing Japan security. In 2016 with the increasing conflict of territorial disputes between China and Japan. The Chinese military activity in the Japanese border area in the East China Sea raises concerns over the security and defense of both the state and the Japanese people, thus encouraging Japan reinterpretation of Article 9 which expand the function of the Japan self defense force to encourage the development of Japan military capabilities. This research is a qualitative research using literature data collection techniques and offense-defense theory with maritime security concept to see Japan defense policies for China military presence in the East China Sea with indicators, military capability, geographical area, social and political condition, and public opinion and officials. The results of the study show that Japan defense policy toward increasing China military in East China Sea prioritizes efforts to deterrence and increasing military capabilities which are carried out solely not for aggressive purpose but to achieve maritime superiority and be able to defend their own country to become a normal country (*Futsū no Kuni*).

Keywords: Japan, China, Article 9, Military Capability, East China Sea